

# SOSIALISASI PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM MELALUI SURAT KETERANGAN USAHA

Amarul Azhar

Email : [hk19.amarulazhar@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.amarulazhar@mhs.ubpkarawang.ac.id)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan  
Karawang, Jalan Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe  
Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

## ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan pengabdian dari mahasiswa kepada masyarakat, dengan mengedepankan tiga prinsip yaitu pendidikan, pengajaran dan pengabdian. KKN merupakan salah satu dari tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setiap tahun. Salah satu program kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setiap tahun. Salah satu program kerja dalam kegiatan KKN ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi UMKM melalui surat keterangan usah. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan maskin banyak pelaku UMKM yang lainnya. Salah satu UMKM di Desa Gempolkarya adalah UMKM Dendeng Ikan. UMKM ini memiliki permasalahan mengenai kurangnya angka UMKM di Desa Gempolkarya karena kurangnya bantuan pemerintah. Maka dari itu dilakukan sosialisasi agar menambahnya pelaku UMKM di Desa Gempolkarya dan berkembang secara pesat.

***Kata Kunci : KKN, UMKM, Bantuan Pemerintah***

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12. Desa Gempolkarya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tirtajaya. Kabupaten Karawang. Secara geografis letak wilayah Desa Gempolkarya terletak di titik LS -6.062514 dan BT 107.265117 dengan batas-batas wilayah yakni batas utara Desa Sumurlaban, batas timur Desa Srijaya, batas selatan Desa Kampung sawah, dan batas sebelah barat Desa Pisangsambo. Desa Gempolkarya memiliki luas wilayah sekitar 400,30 Ha yang terbagi menjadi dua jenis pertanahan, yang pertama untuk tanah sawah/perkebunan seluas 360,17 Ha, yang kedua yaitu perumahan/pemukiman seluas 40,19 Ha. Berdasarkan data pokok desa atau keluarahan tahun 2021, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4703 jiwa, yang terdiri dari 2387 jiwa laki-laki dan 2316 Jiwa perempuan dengan kepadatan 1.175,75 Jiwa/km. Desa Gempolkarya terletak ditengah masyarakat yang unggul di sektor pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, tidak sedikit dari masyarakat Desa Gempolkarya berprofesi sebagai petani dan peternak, ada juga sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka warung atau toko sembako, sisanya berprofesi lain dan rata-rata mendirikan usaha (UMKM), berdasarkan data pokok desa tahun 2021, desa ini mempunyai 200 usaha mikro kecil menengah dan yang menerima bantuan usaha sebanyak 49 UMKM.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk Pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar atau pelatihan bagi masyarakat untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud relevansi antara teori yang di dapat selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui terutama dalam dunia usaha UMKM. Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Universitas Buana Perjuangan Karawang dilakukan secara Hybrid atau kombinasi antara KKN langsung dan dalam jaringan. KKN kali ini merupakan pelaksanaan KKN yang ke-5 dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri”. Kegiatan KKN ini dilakukan di 84 desa dari 16 kecamatan kabupaten yang ada di karawang dan diselenggarakan setiap tahun. Salah satunya yaitu Desa Gempolkarya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang menjadi salah satu target untuk dikembangkan dan dimaksimalkan dalam ruang lingkup UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia secara nasional telah menunjukkan bahwa kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang konsisten dan berkembang. pembangunan usaha mikro dan kecil perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu, perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga sebagai jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Menambah modal bagi industri kecil bukan hal yang mudah. Bagi usaha menengah kecil (UMKM) meminjam uang di bank selain harus menanggung

bunga yang cukup tinggi juga melalui prosedur yang tidak mudah. Selain itu tidak adanya jaminan anggunan merupakan alasan utama bagi sebagian besar UMKM untuk tidak mengajukan permohonan kredit kepada perbankan, tetapi lebih memilih pihak-pihak penyedia dana atau lembaga-lembaga non bank seperti rentenir. Dalam kondisi yang demikian, usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan keterbatasan modal tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain seperti pemerintah. Menurut Hidayat.(2011), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, maka dari itu dalam mensukseskan suatu usaha pemerintah harus menerapkan bantuan kepada para pelaku UMKM yang masih membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam artikel Kuliah Kerja Nyata (KKN) menggunakan metode deskriptif, dimana melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Waktu pelaksanaan KKN dilakukan dari mulai 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2022, yang bertempat di Desa Gempolkarya. Target/sasaran dalam pelaksanaan KKN adalah dapat melatih dan memberi pemahaman mengenai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah, untuk membantu pelaku UMKM kecil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli. Adapun tugas yang dilakukan penulis mengenai sosialisasi pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah sebagai berikut :

## 1. Observasi Kepala Kantor Desa Mengenai Penyaluran Bantuan



*Gambar 1. Observasi*

## 1. Pelatihan Pembuatan SKU Pada Pelaku UMKM



*Gambar 2. Pelatihan Pembuatan SKU*

## **PEMBAHASAN**

Usaha Mikro kecil merupakan penopang ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Bagi para pelaku UMKM, SKU adalah syarat paling awal agar usaha yang baru dirintis mendapat izin dari pejabat setempat. SKU dibuat oleh pejabat seperti pihak kepala desan atau kelurahan. Pengurusnya cukup ke kantor desa atau ke kelurahan, setelah di sahkan oleh kantor kecamatan. Meski bisnis yang kamu rintis masih dalam skala kecil dan dikerjakan dari dalam rumah.

Managemen pengelolaan perusahaan tetap harus diperhatikan. Salah satunya adalah harus memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU). Dalam pembuatan SKU tidak ada biaya apapun untuk membuat SKU dan prosesnyapun sangat mudah. Masa berlakunya adalah satu tahun dan bias di perpanjang tanpa biaya lagi.

Syarat membuat SKU secara offline :

1. KTP, asli dan foto copy
2. KK/Kartu Keluarga, asli dan foto copy
3. Surat permohonan dilengkapi materai
4. Surat pengantar dari RT/.RW
5. Formulir pendukung yang sudah diisi
6. Foto lokasi usaha
7. Surat pernyataan tidak berjualan di trotoar atau badan jalan
8. Surat kuasa apabila pengurusan pendaftaran SKU di serahkan kepada orang lain
9. Perjanjia sewa tempat dan kartu identitas pemilik tempat (bagi pengusaha yang menyewa tempat dari orang lain)

Setelah semua dokumen dilengkapi, bias langsung dating ke kantor desa atau kelurahan untuk membuat Surat Keterangan Usaha dan di sahkan di kantor kecamatan.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pedoman mengenai bantuan UMKM dalam sebuah usaha mempunyai peran penting untuk menumbuhkan pelaku UMKM yang baru maka dari itu adanya sosialisasi dari mahasiswa KKN mengenai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM melalui SKU di Desa Gempolkarya dan membantu para pelaku UMKM untuk menjual produk dan mengembangkan usahanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku Paduan Kuliah Kerja Nyata Hybrid Tahun 2022.(2022). Buku Paduan  
Eliagus Telaumbanua. Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan  
Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli. Jurnal  
Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2, Juni 2021 E-ISSN : 2599-3410 |  
P-ISSN : 2614-3259